

**KOORDINASI MUSPIKA DALAM MENUMBUHKAN RASA NASIONALISME
MASYARAKAT DI KECAMATAN BADAU**

Sagitarisman

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

e-mail : gerrard_bourne@yahoo.com / 085750472223

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mencari solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Badau terkait pelaksanaan koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dalam melaksanakan kegiatan bersama. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kurangnya rasa Nasionalisme masyarakat di Kawasan Perbatasan Kecamatan Badau. Fokus penelitian ini adalah bagaimana metode dan teknik koordinasi yang digunakan oleh Muspika Kecamatan Badau.

Kata kunci : Koordinasi, Muspika, Nasionalisme

Abstract

This study aims to find solution of problems faced by the District of Badau local government regarding to coordination of District head meeting (muspika) in working on activities. The tittle of this research is based on problems that occur in area of badau border where the people are lack of their nationalism. The focus of this study is what methods and coordination techniques are applied by the body (muspika) of Badau District.

Keyword : Coordination, Muspika, Nationalism

A. Pendahuluan

Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Kawasan perbatasan dapat dikatakan memiliki masalah yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor yang sangat berpengaruh terkait didalamnya seperti kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Berdasarkan Ringkasan Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara Staf Ahli Bidang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Percepatan Pembangunan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Tertinggal, secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara, yaitu : (1) Penetapan garis batas baik darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan, dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan.

Salah satu hal yang sangat sensitif dalam menjaga keutuhan masyarakat dan wilayah di daerah perbatasan adalah dengan melakukan pengembangan daerah perbatasan. Pengembangan yang dimaksud yaitu melalui pembangunan secara fisik dan moril masyarakatnya. Masyarakat cenderung lebih menghargai pihak

yang peduli kepada mereka dalam hal ekonomi, karena sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Hal inilah biasanya yang dimanfaatkan oleh negara tetangga untuk menarik simpati masyarakat di perbatasan. Pihak negara tetangga berusaha melakukan pembangunan sarana dan prasarana di daerah perbatasan demi mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Perlakuan yang diberikan seperti ini pada akhirnya akan membuat masyarakat senang kepada negara tetangga dan lebih senang wilayahnya bergabung dengan negara tetangga. Saat situasi ini yang terjadi, semakin memudahkan negara tetangga untuk mengakui keberadaan suatu wilayah sebagai salah satu wilayah negaranya.

Warga di Kecamatan Badau terutama yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia, hampir setiap hari mengadakan kontak ekonomi dengan negeri jiran itu. Bahkan untuk bahan pokok sehari-hari, warga di perbatasan masih banyak yang bergantung ke Malaysia. Hal ini terjadi karena jaraknya yang tergolong dekat. Selain itu juga, warga di perbatasan juga mempunyai ikatan kekerabatan dengan Malaysia. Kemudian didukung kondisi atau keadaan yang cukup mencolok perbedaannya antara kecamatan Badau dengan daerah Malaysia yang berbatasan dengan kecamatan Badau ini. Mereka yang hidup di daerah pedesaan yang jaraknya jauh dari Desa Badau

masih belum menikmati sarana yang memadai seperti listrik dan akses jalan ataupun perumahan yang cenderung masih sederhana. Tapi di seberang kecamatan Badau memiliki suasana yang berbeda. Akses jalan yang lancar, listrik yang mendukung, dan lainnya. Malaysia menjanjikan berbagai hal yang membuat hidup lebih mudah dan nyaman. Situasi yang terjadi seperti inilah membuat keadaan masyarakat di Kecamatan Badau dapat dikatakan belum sejahtera jika dibandingkan dengan masyarakat di Lubouk Antu apalagi masyarakat di Kuching.

Perlu kita ketahui bahwa banyak warga yang menyatakan layanan kesehatan Malaysia lebih baik. Pasien segera mendapatkan penanganan intensif tanpa peduli apakah beridentitas sebagai warga Indonesia atau Malaysia. Hal lain yang lebih penting, jika belum mampu membayar biaya berobat, warga Indonesia dapat melunasinya dengan cara mencicil. Karena masalah ekonomi dan kesehatan itu, nasionalisme warga Indonesia dipandang mulai berkurang.

Hal-hal tersebut dirasakan dan berdampak langsung terhadap masyarakat, sehingga mereka merasa jauh lebih nyaman menjadi warga negara tetangga dibanding negara sendiri. Inilah sebagian kecil dari banyak penyebab yang dapat mengurangi rasa nasionalisme masyarakat kecamatan Badau. Situasi yang juga kita takutkan apabila dibiarkan secara terus menerus, pada akhirnya dapat mengganggu keutuhan NKRI.

Selain itu, yang perlu kita ketahui adalah pelaksanaan pembangunan di daerah kecamatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, khususnya bagi seorang Camat sebagai wakil Pemerintah di tingkat kecamatan. Berkaitan dengan daerah perbatasan ini juga, Camat tidak dapat bekerja sendiri secara aktif, karena juga berhubungan dengan keutuhan Negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu peran aktif dari pihak kepolisian dan tentara, yaitu Kapolsek dan Danramil selaku pimpinannya.

Situasi yang terjadi ini menuntut adanya 3 pimpinan dengan berbeda instansi yang harus berperan aktif, mengharuskan adanya suatu kerjasama yang baik dapat terjalin. Namun dari berbagai kasus yang dijelaskan sebelumnya, pengamatan sepintas memperlihatkan bagaimana masih terdapat kekurangan dalam hal koordinasi antara ketiga pihak tersebut. Dimana beberapa kelompok masyarakat yang jauh dari Ibukota Kecamatan masih

merasakan kurangnya koordinasi antara Camat, Kapolsek, dan Danramil dalam rangka membangun rasa Nasionalisme masyarakat Kecamatan Badau. Penanaman rasa nasionalisme bagi masyarakat perbatasan seharusnya dapat dilakukan dengan baik apabila ketiga unsur Muspika di Kecamatan Badau tersebut sering melakukan koordinasi. Oleh karena itu, tentunya permasalahan ini akan sangat menarik dibahas karena tidak hanya menyangkut persoalan di tingkat daerah Kabupaten, tetapi juga sampai kepada tingkat nasional. Selain itu, diharapkan pada akhirnya nanti penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pihak Pemerintah dalam meminimalisir segala permasalahan perbatasan.

Setelah melihat segala penjelasan di atas, ternyata masih banyak terjadi permasalahan di kecamatan Badau, yang merupakan salah satu kecamatan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Selain itu, pihak yang memiliki peran paling besar di Kecamatan Badau adalah Muspikanya. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini, peneliti merasa perlu membatasi permasalahannya pada Bagaimana metode dan teknik Musyawarah Pimpinan Kecamatan dalam menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut serta memperhatikan fokus penelitian yang telah ditentukan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis metode dan teknik koordinasi Muspika dalam menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakat di Kecamatan Badau;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas koordinasi Muspika dalam menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakat di Kecamatan Badau;
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis rasa Nasionalisme masyarakat Kecamatan Badau;
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan koordinasi musyawarah pimpinan kecamatan dalam menumbuhkan Rasa Nasionalisme masyarakat Kecamatan Badau.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait dalam hal pembangunan di daerah perbatasan Kecamatan Badau, khususnya pihak Muspika sehingga dapat menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakatnya.

B. Kerangka Teori dan Metodologi

B.1. Metode dan Teknik Koordinasi dalam menumbuhkan rasa Nasionalisme

Koordinasi merupakan suatu unsur dalam manajemen yang sangat besar perannya dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan, apalagi yang menyangkut orang banyak atau bahkan berbagai organisasi. Menurut Purwanto (dalam Moekijat, 1994:7) koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan.

Mengenai ruang lingkup, Terry (dalam Moekijat, 1994:29) juga membagi koordinasi dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Koordinasi intern; yaitu berhubungan dengan penyatupaduan kegiatan-kegiatan, ide-ide, dan orang-orang dalam suatu perusahaan/instansi;
2. Koordinasi ekstern; yaitu penyatupaduan kegiatan-kegiatan dari perusahaan-perusahaan lain dan dengan kekuasaan-kekuasaan serta keadaan-keadaan ekstern bagi perusahaan tersebut;
3. Koordinasi vertikal; yaitu penyatupaduan kegiatan-kegiatan adalah di antara tingkat-tingkat berturut-turut dalam struktur organisasi;

Koordinasi horizontal berhubungan dengan kegiatan kegiatan dalam tiap tingkat organisasi dan sedikit lebih sulit mencapainya ketimbang koordinasi vertikal.

Selain menurut Terry (dalam Moekijat, 1994:33), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, pada pasal 1 menyebutkan ada tiga jenis koordinasi, yaitu :

1. Koordinasi Fungsional; antara dua atau lebih Instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.
2. Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan;
3. Koordinasi teritorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Berdasarkan berbagai ruang lingkup yang telah disebutkan baik menurut Terry maupun Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, maka kita dapat melihat bahwa ruang lingkup yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah koordinasi ektern dan

koordinasi instansional. Hal ini dikarenakan adanya suatu urusan yang bersangkutan antara tiga instansi terkait, yaitu Pemerintah Kecamatan, kepolisian, dan tentara dalam urusan peningkatan rasa Nasionalisme masyarakat di Kecamatan Badau.

Kemudian agar tercapai suatu koordinasi yang efektif, Tripathi dan Redhy (dalam Moekijat, 1994:39) mengemukakan ada 5 syarat, yaitu kontinuitas, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dan komunikasi yang efektif;

Pelaksanaan koordinasi sendiri bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan, walaupun berbagai macam cara dilakukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi. Koordinasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Soewarno (1992:124) dalam bukunya menyebutkan bahwa ada lima metode dan teknik dalam melaksanakan koordinasi, yaitu :

- a. Koordinasi melalui kewenangan;

Kewenangan yang digunakan setiap pihak dalam jabatannya diharapkan akan dapat memberikan kelancaran sehingga terjadinya keserasian dalam pelaksanaan segala kegiatan sehingga tujuan yang diinginkan oleh organisasi dapat tercapai.

- b. Koordinasi melalui konsensus.

Koordinasi melalui konsensus merupakan suatu koordinasi yang dilakukan melalui adanya suatu kesepakatan. Konsensus dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saling memotivasi, adanya sistem timbal balik yang saling membutuhkan dalam pelaksanaan kerja.

- c. Koordinasi melalui Pedoman Kerja;

Setiap kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pimpinan, baik berupa tugas, wewenang, hubungan dan tatakerja serta prosedur kerja dan lainnya merupakan landasan atau petunjuk yang harus disusun agar tercipta kesatuan gerak dan kesatuan tindak. Selain itu sebaiknya kebijaksanaan ini juga dituangkan dalam suatu ketentuan atau petunjuk dalam pelaksanaan tugas yang sifatnya membaku, seperti halnya apa yang disebut *Standart Operating Procedures (SOP)*, yang disebut dengan Prosedur Tetap (Protap) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan (Protatap), atau dalam proyek pelaksanaan pembangunan disebut Petunjuk Operasional (PO). Pedoman Kerja atau Petunjuk Kerja, merupakan sarana pengikat dan pengaruh

berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan.

d. Koordinasi melalui suatu forum;

Usaha-usaha koordinasi melalui forum ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi Pemerintah yang bersangkutan.

e. Koordinasi melalui konfrensi.

Koordinasi dengan konfrensi diartikan dengan rapat-rapat atau sidang-sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan (eksekutif) maupun pada tingkat pelaksana. Rapat-rapat/sidang-sidang pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan, akan tetapi dipergunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi.

Berkaitan dengan tokoh utama yang berperan besar dalam pembangunan di Kecamatan Badau sebagai lokus penelitian, tentu dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari sosok para Muspika kecamatan Badau. Unsur Muspika ini merupakan pihak yang paling besar memainkan perannya. Hal ini juga berdasarkan pada penjelasan Keppres No 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah, dimana dalam lingkup kecamatan terdapat Camat, Kapolsek, dan Danramil. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Camat selaku Pemerintah juga didasarkan pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa seorang Camat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Langkah awal yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah adalah penanaman rasa Nasionalisme masyarakat di Kecamatan Badau. Penanaman rasa nasionalisme ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan

Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Dalam Permendagri ini dijelaskan bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri merupakan proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu Pedoman Pemerintah daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk menjadikan sumber daya manusia Indonesia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa Nasionalisme dan Patriotisme. Sebagai pihak yang memiliki peran terbesar di Kecamatan Badau dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ini adalah para Muspika yang terdiri dari Camat, Kepala Polisi Sektor (Kapolsek), dan Komandan Rayon Militer (Danramil) Kecamatan Badau.

Banyak pandangan dari berbagai ahli mengenai nasionalisme. Kohn (1984:11) mengatakan bahwa Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.

Pengertian mengenai Nasionalisme menurut Kohn menitik beratkan kepada rasa kesetiaan yang dimiliki setiap warga negara sehingga mereka benar-benar menyerahkan jiwa mereka kepada negaranya. Hal ini tentu menjadikan seseorang mempunyai rasa memiliki yang sangat amat besar terhadap negaranya. Saat adanya perasaan yang demikian tentunya membuat setiap warga negara berusaha keras untuk membangun bangsa dan negaranya kearah yang lebih baik. Selain itu, menurut Kartodirjo (1999:60) Nasionalisme memuat tentang kesatuan (*unity*), kebebasan (*liberty*), kesamaan (*quality*), demokrasi, kepribadian nasional serta prestasi kolektif.

Oleh karena itu, Nasionalisme dapat disimpulkan sebagai suatu paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini serta kesamaan pandangan. Kemudian dikuatkan lagi dengan adanya harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. Untuk mewujudkan kesadaran tersebut dibutuhkan semangat patriot dan perikemanusiaan yang tinggi, serta demokratisasi dan kebebasan berfikir sehingga akan mampu menumbuhkan semangat persatuan dalam masyarakat yang pluralis.

Adapun indikator rasa Nasionalisme menurut Malino mengenai rasa cinta tanah air mengenai kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, yaitu:

1. Peduli terhadap nama baik bangsa dan negara.

Rasa kepedulian masyarakat untuk menjaga nama baik bangsa dan negara akan membuat seseorang berusaha berbuat baik saat berada di Negara tetangga. Pada saat penduduk Kecamatan Badau melakukan sesuatu hal yang buruk di wilayah Malaysia, tentunya nama Indonesialah yang akan dinilai buruk. Oleh karena itu, masyarakat haruslah berusaha bersikap baik dalam hal apapun yang ada hubungannya dengan Negara lain.

2. Merasa bangga sebagai orang yang bertanah air Indonesia

Perasaan bangga sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) haruslah dimiliki oleh setiap orang. Rasa bangga ini yang akan menjadi bekal dalam diri seseorang untuk tetap menjaga nama baik tanah airnya dimanapun ia berada. Rasa kebanggaan ini juga yang akan meningkatkan semangat seseorang untuk menjaga situasi yang kondusif di tanah airnya, khususnya ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya.

3. Bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa

Seseorang yang memiliki rasa kecintaan terhadap tanah airnya pasti bersedia jika diminta untuk membela tanah airnya dalam hal apapun. Hal terburuk adalah apabila terjadinya suatu konflik di daerah perbatasan, tentulah seseorang yang memiliki rasa kecintaan terhadap tanah airnya akan berusaha membela daerahnya agar tidak dirusak oleh Negara tetangga.

4. Peduli terhadap rusaknya hutan/lingkungan di tanah air

Seseorang yang memiliki rasa kecintaan terhadap tanah airnya pasti akan berusaha menjaga lingkungan hidupnya. Lingkungan alam yang ada akan berusaha dijaga agar tidak dieksplor secara berlebihan tanpa adanya peremajaan alam kembali. Setiap orang akan berusaha membuat lingkungan

alamnya menjadi lebih asri sehingga akan membuat nyaman saat berada di lingkungan tersebut.

5. Mematuhi aturan hukum yang berlaku

Ketertiban dan keamanan suatu lingkungan apabila setiap orang yang tinggal di lingkungan tersebut mampu menaati segala aturan yang berlaku. Aturan dibuat dengan tujuan menciptakan suatu suasana yang tertib, aman dan tenram. Seseorang yang memiliki rasa kecintaan terhadap tanah airnya tentulah akan berusaha untuk menaati segala aturan yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan tentram.

6. Mau hidup dimanapun di wilayah negara kesatuan Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah tentunya memiliki kekurangannya dan kelebihan masing-masing. Apabila seseorang memiliki rasa kecintaan terhadap tanah airnya, maka ia akan siap untuk tinggal dimanapun, selama masih berada di wilayah Negara Indonesia. Namun pada kenyataannya kita juga perlu memahami situasi suatu daerah juga terkadang yang membuat seseorang berat untuk tinggal di daerah tersebut. Misalnya saja karena faktor ekonomi ataupun kelancaran dalam memenuhi kebutuhan, ataupun karena faktor sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

B.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta. Hal ini senada dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2011) yang mengatakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tentang karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Disamping itu guna memperoleh informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penulis menempuh langkah sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh teori-teori serta bahan-bahan

yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini berdasarkan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan dari objek penelitian, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung guna memperoleh permasalahan yang diteliti.

Oleh karena itu, metode deskriptif merupakan suatu pendekatan terhadap objek penelitian guna melihat permasalahan fokus mengidentifikasi masalah pada saat sekarang berdasarkan apa adanya.

Penelitian ini dilaksanakan daerah perbatasan antara kabupaten Kapuas Hulu dengan Malaysia, yaitu di Kecamatan Badau. Adapun pertimbangan pemilihan Kecamatan Badau sebagai tempat penelitian karena kecamatan Badau merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan memiliki berbagai permasalahan khususnya dalam hal Nasionalisme masyarakatnya yang diakibatkan berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, keamanan dan ketertiban, serta kesehatan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Camat, Kapolsek, dan Danramil Kecamatan Badau sebagai unsur dari Muspika yang mempunyai peranan paling besar dalam pelaksanaan koordinasi, serta sebagian tokoh masyarakat Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan yang akan menjadi objek penelitian adalah koordinasi yang dilakukan oleh Muspika dalam meningkatkan rasa Nasionalisme masyarakat. Tentunya rasa Nasionalisme ini adalah sesuatu yang dimiliki dalam jiwa seorang warga negara yang tinggal di Kecamatan Badau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, aktivitas dalam analisis data terdiri dari 3 tahap yaitu meringkas data (*data reduction*), memaparkan (*data display*), dan menyimpulkan (*verification*). Sedangkan untuk mendapatkan validitasnya menggunakan teknik triangulasi.

C. Hasil Pembahasan

Camat sebagai Penanggung jawab utama di Kecamatan Badau berusaha merangkul semua pihak dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Pihak utama yang menjadi rekan kerja dalam menciptakan kehidupan aman dan tentram di Kecamatan Badau adalah Kapolsek dan Danramil Badau. Ketiga pimpinan instansi yang berbeda ini terikat suatu kerjasama dalam forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).

“Koordinasi dengan Kapolsek dan Danramil harus kita lakukan. Mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan harus kita jadikan mitra kerja yang baik. Kami sering melakukan koordinasi, baik saat mengadakan pertemuan ataupun sambil minum kopi di pasar”. (wawancara hari rabu, 19 september 2012, dengan Camat Badau).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Camat sebagai koordinator Muspika berusaha membangun kerja sama dengan yang baik dengan Kapolsek dan Danramil. Koordinasi antar unsur Muspika berusaha dilakukan sesering mungkin baik secara formal maupun informal untuk mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat di Kecamatan Badau. Koordinasi secara formal misalnya melalui pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat membahas suatu kegiatan.

Selain itu, rapat-rapat koordinasi juga dilakukan untuk mengevaluasi situasi yang terjadi di Kecamatan Badau. Sedangkan koordinasi secara informal misalnya dilakukan pada saat makan bersama di pasar ataupun santai sambil minum kopi di warung di pasar Badau. Intensifnya koordinasi yang dilakukan oleh Muspika ini juga dilakukan agar tidak mudah terjadinya salah paham dalam menanggapi suatu permasalahan yang terjadi di Kecamatan Badau.

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Muspika apabila dilihat dari metode dan teknik koordinasinya terdiri dari empat dari lima metode dan teknik koordinasi yang disampaikan oleh Soewarno (1992:24). Keempat metode dan teknik yang digunakan Muspika Badau yaitu :

- a. Koordinasi melalui kewenangan

Kewenangan melaksanakan koordinasi yang dimiliki Camat Badau sebagai Koordinator dalam Muspika terdapat

dalam Pasal 17 PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa dalam menjaga ketertiban dan keamanan, Camat dapat melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian dan pihak lain yang terkait, seperti dari pihak tentara yang bertugas di Kecamatan Badau. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Camat Badau saat diwawancarai.

“Dalam PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan juga ada disebutkan bahwa abang sebagai Camat harus mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kecamatan Badau” (wawancara hari rabu, 19 september 2012, dengan Camat Badau).

Pendapat yang disampaikan oleh Camat Badau ini dipertegas lagi dari apa yang disampaikan oleh Kapolsek Badau.

“sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Kecamatan Badau ini, kita diwajibkan untuk dapat bekerja sama dengan Camat sebagai Penanggung jawab utama wilayah Kecamatan Badau” (wawancara hari sabtu, 15 september 2012, dengan Bapak Suparman, Kapolsek Badau).

Berdasarkan apa yang disampaikan kedua pihak tersebut dapat dilihat bahwa adanya kewenangan dalam menjalankan tugasnya dari setiap pihak untuk berkoordinasi dengan unsur Muspika lainnya.

b. Koordinasi melalui konsensus

Koordinasi melalui konsensus dilakukan dengan cara saling memberikan motivasi antara Muspika. Selain itu juga, kerja sama yang dilakukan oleh Muspika saling memberikan keuntungan bagi setiap pihaknya. Adanya hubungan timbal balik yang terjadi antar Muspika semakin memperkuat koordinasi yang mereka ciptakan.

Adanya kerjasama yang baik ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Camat Badau dalam wawancaranya.

“Pada saat saya berada di luar kota, Bapak Kapolsek dan Danramil juga terus memberikan informasi kepada saya mengenai keadaan di Kecamatan” (wawancara hari rabu, 19 september 2012, dengan Camat Badau).

Pernyataan Camat Badau ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Kapolsek Badau.

“Setiap harinya saya selalu berusaha menyampaikan perkembangan situasi yang terjadi di Kecamatan Badau.

Apabila Pak Camat sedang berada di luar kota sekalipun, kita selalu berusaha saling berkomunikasi, sehingga Pak Camat tahu apa yang sedang terjadi disini” (wawancara hari sabtu, 15 september 2012, dengan Bapak Suparman, Kapolsek Badau).

Setelah mendengarkan hasil wawancara Kapolsek, peneliti dapat mengetahui bahwa memang telah adanya suatu komunikasi yang terus dilakukan walaupun salah satu unsur Muspika tidak berada di wilayah Kecamatan Badau

a. Koordinasi melalui forum

Koordinasi antara Camat, Kapolsek dan Danramil Badau terbentuk dalam suatu forum kecil yang disebut dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). Forum ini juga terbentuk berdasarkan Keppres No 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah. Forum yang dibentuk ini memberikan ikatan secara resmi agar dilakukannya kerja sama antara Camat, Kapolsek, dan Danramil tersebut. Forum Muspika Badau selama ini berusaha melakukan koordinasi dengan baik dalam menjaga ketentraman hidup masyarakat Kecamatan Badau. Hal ini dibuktikan dengan seringnya ada komunikasi yang mereka lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan telepon seluler dalam memberikan informasi situasi setiap hariya.

b. Koordinasi melalui konferensi

Muspika dalam melakukan koordinasi sesama mereka berusaha dilakukan secara formal dan informal. Koordinasi secara formal dilakukan melalui rapat pembahasan suatu kegiatan dan masalah, serta evaluasi terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Setiap akan diadakannya suatu kegiatan, ketiga unsur Muspika ini akan mengadakan rapat terlebih dahulu. Rapat persiapan suatu kegiatan terkadang melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya saja kegiatan yang baru saja dilaksanakan yaitu Pilkada.

Soewarno dalam teorinya menyebutkan ada 5 (lima) metode dan teknik dalam melakukan koordinasi. Sedangkan Muspika Badau hanya menjalankan 4 (empat) metode saja. Satu metode dan teknik koordinasi yang tidak digunakan oleh Muspika Badau adalah koordinasi melalui pedoman kerja. Koordinasi dalam pedoman kerja ini menjelaskan bahwa haruslah terdapat suatu aturan prosedur kerja bersifat baku yang biasanya disebut

Prosedur Tetap (Protap) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan (Protatap). Kekurangan ini juga diakui oleh Camat dalam penjelasannya saat diwawancarai.

”Selama ini dalam forum Muspika, kami bergerak berdasarkan kesepakatan yang kami buat pada saat melaksanakan koordinasi. Setau saya, tidak ada aturan berupa Protap yang mengatur koordinasi yang kami lakukan” (wawancara hari jum’at, 14 september 2012, dengan Camat Badau).

Pernyataan Camat Badau ini ditegaskan juga oleh Danramil Badau pada saat diwawancarai.

“setau saya prosedur yang seperti itu tidak ada. Kita melaksanakan tugas sebagai Muspika selama ini berdasarkan kesepakatan yang kita buat bersama. Apabila ada sesuatu kita bicarakan bagaimana tindak lanjut yang akan diambil” (wawancara hari senin, 14 september 2012, dengan Danramil Badau)

Tidak adanya prosedur dalam koordinasi ini mengakibatkan segala tindakan yang dilakukan oleh Muspika dalam menangani suatu keadaan lebih kepada berdasarkan kesepakatan antara ketiga unsur Muspika ini. Hal ini yang sering menyebabkan lambatnya penyelesaian suatu masalah.

Sedangkan gambaran mengenai efektifitas koordinasi yang telah dilakukan oleh Muspika berdasarkan teori Tripathi dan Redhy (dalam Moekijat, 1994:156), yaitu :

a. Kontinuitas

Muspika Kecamatan Badau berusaha melakukan berbagai usaha dalam menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakat Kecamatan Badau. Segala kegiatan yang telah mereka rencanakan secara terus-menerus mereka lakukan bersama. Muspika selalu bersama-sama mulai dari merencanakan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Tujuan yang jelas

Setiap kegiatan yang Muspika rencanakan pada dasarnya bertujuan untuk memajukan Kecamatan Badau. Pada penelitian kali ini, peneliti melihat beberapa kegiatan dilakukan oleh Muspika, baik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ataupun menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Muspika yakin dengan adanya suatu masyarakat yang sejahtera dengan

lingkungan yang aman pasti akan dapat menumbuhkan rasa Nasionalisme dalam jiwanya.

c. Organisasi yang sederhana

Suatu organisasi diperlukan untuk mengikat Camat, Kapolsek, dan Danramil agar selalu dapat bekerja sama. Dalam hal ini mereka tergabung dalam suatu forum yang disebut Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Adanya organisasi sederhana ini memberikan rasa tanggung jawab terhadap masing-masing Muspika untuk tetap menjalin koordinasi dalam setiap kerjanya demi menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakat Badau. Adanya organisasi Muspika membuat Camat, Kapolsek, dan Danramil sering terlihat bersama-sama saat berada disetiap kegiatan masyarakat.

d. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Muspika Kecamatan Badau dalam melaksanakan kerja sama tidak didukung adanya pembagian wewenang secara jelas. Mereka hanya berpedoman pada tugas kerja masing-masing dan hasil dari kesepakatan bersama. Hal ini terkadang menjadi kendala pada saat ada permasalahan yang harus cepat ditangani. Salah satu unsur Muspika tidak bisa segera menanganinya karena dikhawatirkan bukan merupakan kewenangannya.

Situasi seperti yang dijelaskan di atas membuat Muspika harus berkoordinasi terlebih dahulu. Hal inilah yang menyebabkan penanganan suatu permasalahan cenderung lambat. Keadaan ini tentunya akan semakin sulit apabila terjadi di desa yang jaringan sinyalnya lemah, sehingga menyebabkan Muspika sulit untuk berkoordinasi.

e. Komunikasi yang efektif

Komunikasi merupakan suatu unsur dalam koordinasi yang sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Muspika sering melakukan komunikasi, baik secara langsung bertatap muka ataupun lewat *hand phone*.

Komunikasi secara langsung mudah sering dilakukan pada saat mereka sedang berada di satu desa. Namun jika melihat komunikasi yang dilakukan lewat *hand phone* sulit untuk dilakukan saat mereka berada pada desa yang berbeda di Kecamatan Badau. Kendala jaringan sinyal yang masih lemah

di sebagian besar wilayah Badau menjadi kendala untuk berkomunikasi lewat *hand phone*. Hal inilah yang sering menjadi kendala pada saat ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh Muspika secara bersama-sama.

Satu-satunya syarat koordinasi efektif menurut Tripathi dan Redhy yang tidak ada yaitu pada unsur perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Forum Muspika Badau yang terbentuk tidak diikuti dengan pembagian wewenang secara jelas dalam suatu kebijakan tertulis. Penanganan dan pembagian suatu permasalahan lebih kepada berdasarkan kesepakatan dari komunikasi yang dilakukan anta Muspika. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan sebelumnya mengenai metode koordinasi yang tidak dilakukan oleh Muspika Badau, yaitu koordinasi melalui pedoman kerja.

Pedoman kerja dalam forum Muspika Badau sebenarnya sangatlah diperlukan dalam membantu pekerjaan mereka. Tidak adanya pedoman kerja yang mengatur gerak Muspika, membuat terjadinya tumpang tindih penanganan secara spontan terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya saja, saat terjadi kesalah pahaman antara beberapa kelompok dalam masyarakat, yang menangani secara langsung untuk menengahi perseteruan ini belumlah jelas.

Kekurangan tersebut membuat siapa yang akan menjadi penengah ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh ketiga unsur Muspika ini. Keadaan yang seperti ini tentunya akan berdampak pada lambatnya penanganan suatu permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat tidak dapat segera diselesaikan karena ketiga unsur Muspika tersebut harus berkoordinasi terlebih dahulu untuk menentukan siapa diantara mereka bertiga yang akan menengahi secara langsung permasalahan tersebut.

Rasa Nasionalisme masyarakat perlahan terus berusaha ditumbuhkan oleh Muspika melalui segala program kegiatan yang melibatkan mereka. Keterlibatan masyarakat disini membuat mereka akan semakin peduli terhadap tanah airnya dan mencintai tanah airnya. Rasa Nasionalisme masyarakat Kecamatan Badau yang ada selama ini berusaha peneliti bahas berdasarkan indikator Nasionalisme menurut Malino. Adapun analisa yang peneliti dapatkan di lapangan yaitu :

1. Peduli terhadap nama baik bangsa dan negara.

Selama berbelanja di Malaysia, tidak sedikit penduduk dari Indonesia membawa barang masuk ke Kecamatan Badau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 600 Ringgit Malaysia. Hal ini terjadi karena besarnya tingkat kebutuhan masyarakat yang tidak mampu dipenuhi di Kecamatan Badau. Penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang penduduk yang bermukim di Kecamatan Badau.

“Kita ini dek tidak bisa lepas dari Malaysia, soalnya banyak kebutuhan sehari-hari kita yang harus beli dari sana. Contoh yang paling mudah yaitu bensin. Kalau kita mengharapkin Bensin dari Putussibau, pasti lama kita tidak punya stok bensin di Badau ini” (wawancara hari Minggu, 16 september 2012, dengan Ibu Salma, salah seorang pemilik warung kopi di Pasar Badau).

Keadaan yang cukup sulit ini terkadang membuat seseorang tidak terlalu peduli untuk berusaha menjaga nama baik bangsa dan Negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, situasi yang sulit seperti ini membuat mereka memiliki pandangan bahwa kurang adanya perhatian dari Pemerintah, baik Kabupaten, Provinsi, ataupun Pusat. Permasalahan yang menyangkut ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam masyarakat ini memang sangat mengganggu kenyamanan hidup masyarakat Kecamatan Badau. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, hal ini terjadi karena keadaan yang tidak mendukung sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan segala ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Bagi masyarakat Kecamatan Badau, yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka untuk dapat mendukung hidup mereka.

2. Merasa bangga sebagai orang yang bertanah air Indonesia

Perasaan bangga terhadap sesuatu bisa dirasakan apabila sesuatu tersebut memiliki kelebihan yang pantas untuk dibanggakan. Namun berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat Kecamatan Badau sulit untuk merasa bangga terhadap Kecamatan Badau. Hal ini disebabkan masih banyaknya kekurangan yang dihadapi dalam kehidupan

mereka, baik berupa sarana maupun prasarana. Segala kekurangan ini tentunya akan menjadi hambatan bagi mereka dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya. Perasaan seperti ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Camat Badau.

“Kalau kita melihat ke seberang, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antara keadaan kita disini dengan daerah Negara tetangga. Pemerintahan mereka benar-benar mendukung pembangunan daerah yang berada di perbatasan. Jangan jauh-jauhlah, mereka dengan segala sarana dan prasarananya telah siap untuk mendukung pembukaan Pos Lintas Batas (PLB). Sedangkan kita, sampai sekarang bangunan PLB saja masih kosong tanpa perabot.” (wawancara hari jum’at, 14 september 2012, dengan Camat Badau).

Pernyataan dari Camat Badau ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu warga Kecamatan Badau yang peneliti temui saat dia akan berbelanja kebutuhan sehari-harinya ke Malaysia.

“adek lihat saja gimana jalan di tempat kita mau ke Malaysia. Bedanya jauh benar. Disana jalannya mulus dek. Belum lagi kalau kita lihat fasilitas umum di tempat kita, masih jauh tertinggal rasanya dibanding di Malaysia. Kami berharap suatu saat daerah kita ni minimal bisa menyaingi mereka” (wawancara hari minggu, 16 september 2012, dengan salah seorang penduduk Desa Badau)

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut yang tidak jauh berbeda memperlihatkan bahwa apabila mulai melihat perbandingan kondisi yang ada di Kecamatan Badau dengan Lubouk Antu, masyarakat Kecamatan Badau mulai merasa lebih banyak kekurangannya dibanding kelebihan yang ada di Kecamatan Badau.

3. Bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa

Rasa memiliki terhadap tanah air Indonesia masih ada di dalam setiap penduduk Kecamatan Badau. Saat membahas mengenai keutuhan tanah air, setiap masyarakat dengan lantang memberikan jawaban tetap akan menjaga keutuhan NKRI. Walaupun Segala kekurangan masih dihadapi masyarakat Kecamatan Badau, apabila konflik antar negara terjadi, masyarakat masih tetap siap untuk membela tanah air Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang penduduk Desa Badau.

“Kami lahir dan besar di Desa Badau ini. Walaupun sarana jalan kita masih banyak yang rusak, ataupun kita masih sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, kami siap membela Indonesia jika terjadi konflik dengan Malaysia” (wawancara Hari Minggu, 16 september 2012, dengan Bapak Ilhamsyah, salah seorang Ketua RT di Desa Badau).

4. Peduli terhadap rusaknya hutan/lingkungan di tanah air

Tolak ukur kepedulian terhadap lingkungan bisa dilihat dari bagaimana setiap penduduk berusaha menjaga kelestarian lingkungan alam di Kecamatan Badau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kehidupan masyarakatnya yang bertani terkadang tidak terlalu memperhatikan kelestarian lingkungan. Mereka membuka lahan dengan membakar hutan yang ada. Cara yang digunakan ini cukup praktis, tapi memiliki banyak dampak negatif. Misalnya seperti rusaknya hutan dan menambah polusi udara akibat asap.

Selain itu, kondisi lingkungan di Desa Badau misalnya, masih banyak penduduk yang membuang sampah sembarangan. Tidak adanya tempat pembuangan sampah membuat masyarakat terbiasa membuang sampah semau hatinya. Sebagian penduduk biasanya juga dengan membakar sampah tersebut di halaman rumahnya. Situasi yang seperti ini menunjukkan masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan alamnya.

Muspika sudah berusaha untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan alamnya. Namun himbauan yang mereka lakukan tidak diikuti dengan pengadaan sarana yang mendukung. Misalnya saja tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara. Selain itu juga, Muspika tidak memberikan tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan pengrusakan terhadap hutan di Kecamatan Badau.

Apabila kita pahami lebih dalam memang permasalahan kepedulian terhadap lingkungan ini memang terjadi sebagian besar daerah di Indonesia. Hal ini sepertinya hampir dapat dikatakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Namun permasalahan kepedulian di daerah perbatasan ini menjadi lebih penting dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia karena menyangkut kenyamanan hidup masyarakat di daerah

perbatasan yang selalu dibayangi kondisi berbeda di Negara tetangga. Adanya bayangan Negara tetangga inilah yang akan mengurangi kebanggaan masyarakat terhadap situasi dan kondisi di daerahnya sendiri, yaitu Kecamatan Badau.

5. Mematuhi aturan hukum yang berlaku

Peraturan hukum dibuat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan tentram di Kecamatan Badau. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar penduduk telah dapat memenuhi segala aturan yang berlaku. Namun masih ada beberapa orang yang terdang melakukan pelanggaran. Misalnya : kebiasaan meminum minuman keras sehingga membuat mabuk dan menimbulkan keributan.

Muspika terlihat kesulitan untuk dapat mengontrol kebiasaan masyarakat yang suka meminum minuman keras. Apabila ada warga yang membuat kekacauan gara-gara mabuk hanya diberikan teguran, tanpa adanya suatu tindakan tegas yang bisa memberikan efek jera.

Akan tetapi, permasalahan minum-minuman keras ini juga perlu dipahami juga karena merupakan suatu budaya yang sudah ada di masyarakat Kecamatan Badau, khususnya bagi masyarakat Dayak. Setiap ada perayaan, seperti panen, nikahan, dan lainnya pasti diikuti dengan meminum-minuman keras.

Selain itu juga, jika mau dilihat lebih seksama lagi mengenai aturan barang masuk dan keluar melewati Pos perbatasan, maka banyak penduduk yang melakukan pelanggaran karena memasukkan barang dari Malaysia ke Kecamatan Badau melewati batas ketentuan jumlah besaran barang yang boleh dibawa masuk. Namun, sekali lagi persoalan ekonomi ini memang sangat sulit untuk ditindak karena kondisi di Kecamatan Badau yang membuat mereka harus melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Permasalahan ini harus bisa dimaklumi karena keadaan yang memaksa mereka untuk melakukannya.

6. Berusaha menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya

Situasi lingkungan yang tertib dan aman akan berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Muspika secara bersama-sama selalu mengajak masyarakat untuk dapat hidup saling menghormati dan menghargai agar terciptanya kerukunan hidup.

Sebagian besar masyarakat memang terlihat mau berusaha menjaga agar lingkungannya. Namun beberapa warga masih ada yang sering melakukan hal-hal buruk sehingga mengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang masih suka meminum minuman keras, sehingga dapat menyebabkan keresahan bagi warga lainnya. Pada saat mereka minum, tidak jarang sampai menimbulkan perkelahian karena emosi yang tidak dapat dikendalikan.

7. Mau hidup dimanapun di wilayah negara kesatuan Indonesia.

Berbicara mengenai tempat tinggal, maka setiap orang pasti ingin tinggal di wilayah yang bisa mendukung kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penduduk yang tinggal di Kecamatan Badau sebagian besarnya adalah penduduk asli kecamatan Badau. Mereka dari lahirnya memang sudah berada di Kecamatan Badau. Namun apabila dikaitkan dengan keadaan kehidupan di Kecamatan Badau, maka banyak yang merasa cukup sulit hidup disana.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sebenarnya keinginan mereka tinggal di Kecamatan Badau sebenarnya lebih kepada tidak ada pilihan lain. Apabila mereka punya pilihan dengan kondisi ekonomi mereka yang mendukung, tentunya mereka berat untuk tinggal di Kecamatan Badau yang kurang tersedianya kebutuhan sehari-hari.

D. Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan Studi

D.1. Kesimpulan

Muspika berusaha melakukan koordinasi dengan baik untuk mampu menciptakan ketertiban dan keamanan di Kecamatan Badau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Muspika Kecamatan Badau menggunakan 4 dari 5 metode dan teknik yang dijelaskan oleh Soewarno. Keempat metode dan teknikya yaitu :

a. Koordinasi melalui kewenangan

Koordinasi yang dilakukan oleh Muspika Badau dilaksanakan dengan adanya dasar kewenangan yang dimiliki oleh Camat, Kapolsek, dan Danramil. Ketiga pimpinan di Instansi yang berbeda-beda ini memiliki kesamaan tugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, sehingga ketiga pimpinan ini berusaha membangun koordinasi dengan baik.

b. Koordinasi melalui konsensus

Koordinasi melalui konsensus dilakukan dengan cara saling memberikan motivasi antara Muspika. Selain itu juga, kerja sama yang dilakukan oleh Muspika saling memberikan keuntungan bagi setiap pihaknya. Adanya hubungan timbal balik dalam menjalankan tugasnya semakin memperkuat koordinasi yang mereka ciptakan.

c. Koordinasi melalui forum

Koordinasi antara Camat, Kapolsek dan Danramil Badau terbentuk dalam suatu forum kecil yang disebut dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). Forum yang dibentuk ini memberikan ikatan secara resmi agar dilakukannya kerja sama antara Camat, Kapolsek, dan Danramil tersebut. Forum Muspika Badau selama ini berusaha melakukan koordinasi dengan baik dalam menjaga ketentraman hidup masyarakat Kecamatan Badau. Hal ini dibuktikan dengan seringnya ada komunikasi yang mereka lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan telepon seluler dalam memberikan informasi situasi setiap harinya.

d. Koordinasi melalui konferensi

Muspika dalam melakukan koordinasi sesama mereka berusaha dilakukan secara formal dan informal. Koordinasi secara formal dilakukan melalui rapat pembahasan suatu kegiatan dan masalah, serta evaluasi terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Setiap akan diadakannya suatu kegiatan, ketiga unsur Muspika ini akan mengadakan rapat terlebih dahulu. Rapat persiapan suatu kegiatan terkadang melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan metode dan teknik yang tidak dilakukan oleh Muspika tetapi sebenarnya memiliki pengaruh

yang cukup besar adalah koordinasi melalui pedoman kerja, yaitu dengan tidak adanya suatu aturan prosedur kerja bersifat baku yang biasanya disebut Prosedur Tetap (Protap) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan (Protatap). Tidak adanya pedoman kerja terkadang mengakibatkan terkesan lambannya penanganan suatu masalah yang terjadi di masyarakat.

Koordinasi Musika memenuhi 4 dari 5 syarat yang disebutkan. Adapun keefektifan koordinasinya dilihat dari 4 syarat koordinasi yang efektif, yaitu :

a. Kontinuitas

Muspika selalu bersama-sama mulai dari merencanakan sampai pada tahap pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini mereka lakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan yang sedang mereka laksanakan, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan bisa cepat diselesaikan bersama.

b. Tujuan yang jelas

Setiap kegiatan yang Muspika rencanakan selalu memiliki tujuan yang jelas dan dipahami dengan baik oleh setiap unsur Muspika. Pada dasarnya setiap tujuan program kegiatan mereka untuk memajukan Kecamatan Badau, baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ataupun menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat merasa diperhatikan dan menumbuhkan rasa Nasionalismenya.

c. Organisasi yang sederhana

Camat, Kapolsek, dan Danramil tergabung dalam suatu forum yang disebut Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Adanya organisasi sederhana ini memberikan rasa tanggung jawab terhadap masing-masing Muspika untuk tetap menjalin koordinasi dalam setiap kerjanya demi menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakat Badau.

d. Komunikasi yang efektif

Muspika sering melakukan komunikasi, baik secara langsung bertatap muka ataupun lewat *hand phone*. Komunikasi secara langsung sering dilakukan pada saat mereka sedang berada di satu Desa. Namun apabila mereka berada di desa yang berbeda, komunikasi melalui *hand phone*

sulit untuk dilakukan karena masih banyaknya desa di Kecamatan Badau yang jaringan sinyalnya tergolong lemah.

Sedangkan syarat efektifnya koordinasi yang tidak terpenuhi adalah perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam forum Muspika. Hal ini sering menjadi kendala pada saat ada permasalahan yang harus cepat ditangani. Penanganan suatu masalah terkesan lamban karena Muspika harus berkoordinasi terlebih dahulu. Hal ini akan semakin sulit apabila terjadi di desa yang jaringan sinyalnya lemah, sehingga menyebabkan Muspika sulit untuk berkoordinasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh Muspika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan rasa Nasionalisme masyarakat Kecamatan Badau. Adapun nasionalisme masyarakat Kecamatan Badau dilihat berdasarkan indikator dari Malino, yaitu :

a. Peduli terhadap nama baik bangsa dan negara.

Keadaan yang cukup sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, membuat masyarakat Kecamatan Badau tidak terlalu peduli untuk berusaha menjaga nama baik bangsa dan Negara. Apalagi menurut mereka, keadaan sulit yang mereka hadapi di Kecamatan Badau dikarenakan kurang adanya perhatian dari Pemerintah, baik Kabupaten, Provinsi, ataupun Pusat.

b. Merasa bangga sebagai orang yang bertanah air Indonesia

Sebagian masyarakat Kecamatan Badau sulit untuk merasa bangga terhadap Kecamatan Badau. Hal ini disebabkan masih banyaknya kekurangan yang dihadapi dalam kehidupan mereka, baik berupa sarana maupun prasarana. Segala kekurangan ini tentunya akan menjadi hambatan bagi mereka dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya.

c. Bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa

Rasa memiliki terhadap tanah air Indonesia masih ada di dalam setiap penduduk Kecamatan Badau. Walaupun Segala kekurangan masih dihadapi masyarakat Kecamatan Badau, apabila konflik antar negara terjadi, masyarakat masih tetap

siap untuk membela tanah air Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana mereka berusaha berpartisipasi dengan Muspika dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kecamatan Badau.

d. Peduli terhadap rusaknya hutan/lingkungan di tanah air

Kepedulian terhadap lingkungan bisa dilihat dari bagaimana setiap penduduk berusaha menjaga kelestarian lingkungan alam di Kecamatan Badau. Kehidupan masyarakatnya yang bertani terkadang tidak terlalu memperhatikan kelestarian lingkungan. Mereka membuka lahan dengan membakar hutan yang ada. Cara yang digunakan ini cukup praktis, tapi memiliki banyak dampak negatif. Misalnya seperti rusaknya hutan dan menambah polusi udara akibat asap.

Situasi yang seperti ini menunjukkan masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Muspika yang kurang mampu mengontrol masyarakat membuat mereka terus-menerus membuka lahan dengan membakar hutan.

e. Mematuhi aturan hukum yang berlaku

Peraturan hukum dibuat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan tentram di Kecamatan Badau. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar penduduk telah dapat memenuhi segala aturan yang berlaku. Namun masih ada beberapa orang yang terkadang melakukan pelanggaran. Misalnya : dikarenakan kebiasaan meminum-minuman membuat beberapa orang penduduk mabuk dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, sehingga dapat menimbulkan keributan.

f. Berusaha menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya

Sebagian besar masyarakat memang terlihat mau berusaha menjaga agar lingkungannya tertib, aman, dan tentram. Namun beberapa warga masih ada yang sering melakukan hal-hal buruk sehingga mengganggu ketentraman masyarakat, seperti sebagian warga yang tidak mampu mengontrol diri saat minum-minuman keras.

g. Mau hidup dimanapun di wilayah negara kesatuan Indonesia.

Biaya hidup di Kecamatan Badau termasuk cukup mahal. Belum lagi kondisi wilayahnya yang masih banyak jalan rusak serta sinyal yang sulit. Selain itu, permasalahan yang paling pokok adalah menyangkut kesehatan. Saat seorang penduduk Kecamatan Badau terserang penyakit, mereka tidak segan-segan untuk berobat ke Lubouk Antu. Penanganan pasien yang sakit disana tergolong lebih baik dibandingkan dengan Kecamatan Badau yang hanya memiliki 1 (satu) Puskesmas dan 1 (orang) dokter saja. Kekurangan dalam unsur kesehatan ini jugalah yang membuat kurang nyamannya kehidupan masyarakat di Kecamatan Badau, dan membuat mereka terkadang berpikir untuk pindah ke tempat lain yang lebih baik.

Camat, Kapolsek, dan Danramil yang telah berusaha sesering mungkin melakukan koordinasi, namun terkadang mengalami kesulitan pada saat-saat tertentu. Berbagai hambatan yang mereka rasakan dalam melaksanakan koordinasi, baik dalam faktor teknis maupun non teknis.

Adapun hambatan yang Muspika hadapi dalam melaksanakan Koordinasi yaitu sebagai berikut :

1. Belum adanya *SOP (Standart Operating Procedure)* yang mengatur tentang koordinasi antara unsur Muspika.
2. Belum adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam Muspika.
3. Kondisi jalan sebagian wilayah Kecamatan Badau yang masih rusak.
4. Jaringan sinyal telepon seluler di sebagian besar Kecamatan Badau masih lemah sehingga menyulitkan Muspika untuk berkoordinasi jika berada di desa yang berbeda di wilayah Kecamatan Badau.
5. Tidak adanya dukungan sarana Transportasi kendaraan roda empat bagi Muspika untuk dapat meninjau seluruh wilayah Kecamatan Badau.
6. Kurangnya ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari di Kecamatan Badau.

Segala hambatan yang ada ini jika terus dibiarkan tentunya akan menyulitkan Muspika dalam melaksanakan pembangunan di

Kecamatan Badau. Selain itu dampaknya juga adalah sulitnya menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakatnya. Masyarakat akan cenderung merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga tidak terlalu peduli dengan segala program yang dilakukan oleh Pemerintah.

D.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti berusaha menyampaikan saran-saran terkait segala hambatan yang dihadapi oleh Muspika Kecamatan Badau dalam meningkatkan rasa Nasionalisme masyarakatnya. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu haruslah membuat suatu *SOP (Standart Operating Procedures)* untuk lebih mengarahkan dan mengatur Koordinasi yang dilakukan oleh Muspika.
2. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus segera membuat peraturan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam Muspika. Pembagian ini perlu dilakukan Muspika untuk membuat gerak Muspika lebih terarah dan tidak terjadinya tumpang tindih dalam penanganan suatu masalah. Selain itu juga, adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas akan memudahkan setiap unsur dalam Muspika untuk lebih cepat bergerak menangani suatu masalah.
3. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus segera memperbaiki sarana jalan di wilayah Kecamatan Badau. Hal ini perlu dilakukan agar dapat membantu kelancaran Muspika dalam mengikuti perkembangan keadaan penduduknya. Selain itu juga, akan mempercepat penanganan suatu masalah yang terjadi di desa-desa di wilayah Kecamatan Badau.
4. Pemerintah Kecamatan harus mampu berusaha membangun kerja sama dengan pihak penyedia jaringan sinyal *hand phone* seperti PT. Indosat dan PT. Telkomsel agar semakin memperbaiki sinyal di Kecamatan Badau. Apabila jaringan sinyal di seluruh wilayah Kecamatan Badau sudah tergolong bagus, maka akan memudahkan Muspika untuk membangun koordinasi sesama mereka saat berada di desa yang berbeda. Selain itu juga, Muspika dapat berkoordinasi dengan para Kepala desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat yang ada di desa-desa di Kecamatan Badau.

5. Penyediaan transportasi dinas roda empat bagi kelancaran Muspika dalam menjalankan fungsinya. Adanya kendaraan roda empat tentunya akan memudahkan Muspika secara bersama-sama untuk sering melakukan kunjungan ke desa-desa di seluruh wilayah Kecamatan Badau. Apalagi perlu disadari bahwa Kecamatan Badau terletak di perbatasan sehingga sangat rawan terjadinya perselisihan dengan masyarakat dari Negara tetangga.
6. Pemerintah harus mampu menyediakan segala kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat Kecamatan Badau.
7. Muspika Kecamatan Badau harus sering melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, Agama, dan Adat. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan keadaan penduduk di desa-desa Kecamatan Badau. Selain itu dapat dijadikan sebagai sarana mengevaluasi segala kebijakan ataupun program kegiatan yang kurang dapat diterima masyarakat.

D.3. Keterbatasan Studi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih banyak faktor lain yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan koordinasi serta hambatan dalam menumbuhkan rasa Nasionalisme masyarakat Kecamatan Badau. Faktor yang paling besar sebenarnya sangat mempengaruhi koordinasi adalah pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Badau. Selain itu, permasalahan utama yang dihadapi kehidupan masyarakatnya adalah dari faktor ekonomi. Namun keterbatasan ilmu yang dipelajari karena diluar jurusan yang dipelajari oleh peneliti membuat permasalahan ini tidak dapat dibahas secara maksimal. Selain itu, keterbatasan waktu dan dokumen pendukung juga membuat peneliti merasa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dari segala kekurangan tersebut, peneliti meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembahasan penelitian. Selain itu, peneliti sangat berharap penelitian yang sudah dilakukan ini dapat lebih disempurnakan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

E. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Drs. Achmad Salafuddin, M.si selaku Camat

Badau yang telah banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga berterima kasih kepada pihak institusi, mulai dari pihak Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan barat yang telah mendukung secara moril dan materiil selama melaksanakan studi.

F. Referensi

- Kohn, Hans. 1984. *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi*. Bandung : Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Kartodirjo, Sartono. 1999. *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Soewarno, Handyaningrat. 1992. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
- Malyno, Jufri. Melalui <<http://juprimalino.blogspot.com/2012/03/nila-indikator-pendidikan-karakter.html>>, (17/10/2012)

Ringkasan Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara oleh Staf Ahli Bidang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Percepatan Pembangunan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Dan Kawasan Tertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : SAGITARISMAN

NIM / Periode Lulus : E42008036 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : gerrard_bourne@yahoo.com / 085750472223

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PELAKSANAAN KOORDINASI MUSYAWARAH PIMPINAN KECAMATAN
DALAM MENUMBUHKAN RASA NASIONALISME MASYARAKAT
DI KECAMATAN BADAU

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal, 10/1/2013.

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 9 Januari 2013

(SAGITARISMAN)

